PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Jumat | Tanggal: 17 Januari 2020 | Halaman: 2

MASUK BELANJA LANGSUNG KECAMATAN

Dana Hibah LPMK Dialihkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dana hibah bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dialihkan masuk ke belanja langsung di kecamatan mulai tahun 2020. Namun LPMK tetap bisa berperan dengan menjadi mitra kelurahan dalam kegiatan yang menggunakan anggaran belanja langsun itu.

"Dana hibah LPMK dialihkan ke belanja langsung di kecamatan. Kuasa pengguna anggaran di kelurahan yang menjadi bagian dari OPD kecamatan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKADO) Kota Yogyakarta, Waseso, Rabu (15/1).

Ia menjelaskan, pengalihan dana hibah LPMK itu mempertimbangkan beberapa hal seperti peraturan pemerintah terkait pemberian hibah. Jika diberikan berturut-turut bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan skema belanja langsung juga dinilai lebih mudah dalam pengelolaan keuangan di kelurahan. Mengingat apabila menggunakan skema hibah harus melalui tahapan pengajuan proposal program.

"Kami mempertimbangkan peraturan hibah tidak boleh berturut-tutur diserahkan ke penerima yang sama. Kecuali lembaganya sudah diatur dalam undang-undang bisa mendapatkan penganggaran seperti Koni," terangnya.

Selain itu pengalihan dana hibah ke belanja langsung itu juga sebagai upaya mencapai persentase 5 persen alokasi dana APBD disalurkan ke kelurahan untuk untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Mengacu aturan itu pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 5 persen anggaran dalam APBD. Pada tahun anggaran 2019, total dana yang dikelola kelurahan di Kota Yogyakarta baru mencapai sekitar dua hingga tiga persen dari APBD.

Meskipun hibah dialihkan, tapi LPMK tetap bisa berperan dalam pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat dengan menjadi mitra kelurahan. Dia menegaskan pelaksan pemegang anggaran di kelurahan sebagai kuasa pengguna anggaran.

"LPMK bisa menjadi mitra kelurahan sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program di wilayah masing-masing," ucap Waseso. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra 2. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005